**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Keberhasilan sisitem pendidikan dapat dilihat dari kemampuan lulusanya menggunakan hasil pendidikan untuk hidup .oleh karena itu, system pendidikan yang baik seharusnya mampu memberikan bekal bagi lulusanya untuk menghadapi kehidupan atau memberikan *life skills* pada peseta didik. Salah satu jalur pendidikan yang ada di Indonesia yang berperan untuk memberi layanan pendidikan selain yang bersumber dari pendidikan persekolahan (formal) adalah jalur pendidikan nonformal. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga mayarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”.

Implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional banyak lembaga-lembaga pendidikan non formal yang dibentuk oleh masyarakat seperti lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) merupakan upaya nyata untuk melaksanakan pendidikan nonformal dalam melatih warga masyarakat agar menguasai bidang-bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan, bakat-minat, dan peluang kerja/usaha mandiri yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja (*job opportunities*) atau usaha mandiri.

Sekarang ini telah banyak lembaga-lembaga kursus dan pelatihan yang dikembangkan. Berdasarkan Data lembaga kursus untuk seluruh Indonesia sebanyak 18.805 lembaga dan yang sudah diverifikasi sebanyak 12.520 lembaga.: Rekapitulasi LKP yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 548, sudah diferifikasi sebanyak 499 lembaga. http://www.infokursus.net (tanggal 21 Januari 2015) Di Kota Makassar terdapat 133 Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menyelenggarakan program Pendidikan Kecakapan menunjukkan bahwa sudah sangat beragam penyelenggaraan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melalui mitra LKP, yakni; Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) dan Desa Vokasi dilakukan guna meningkatkan kualitas lulusan agar luaran kursus dapat bekerja atau berusaha mandiri dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Walaupun Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menjadi mitra yang dipercayakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan program kursus dan pelatihan bagi masyarakat yang kurang berdaya, namun belum dapat memperlihatkan hasil yang maksimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pelatihan. Hal ini terkait dengan kualifikasi dan kompetensi penyelenggara dalam mengelola program PKH, pengelolaan proses pembelajaran oleh instruktur/sumber belajar dan kurangnya keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Suryono dan Entoh (2009:19) mengungkapkan hasil temuannya tentang luaran program pendidikan kecakapan hidup bahwa:

Sebagian besar lulusan belum dapat mempraktekkan kompetensi yang telah dimiliki pada dunia kerja/usaha karena berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan baik yang berasal dari warga belajar, proses pembelajaran, dan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup belum semua dapat optimal mengurangi/mengatasi tingkat kemiskinan secara cepat

Dilihat dari kurikulum pembelajaran, Situmorang (2010:47) mengatakan bahwa:

Secara khusus, kurikulum dan bahan ajar belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Standar isi hanya mengacu pada kompetensi professional/ vokasional saja dengan proporsi teori seimbang dengan praktik. Muatan kurikulum tentang kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi akademik belum tampak secara nyata. Kegiatan pelatihan dan PKH hanya bertumpu pada praktik dan penguasaan keterampilan yang berkenaan dengan jenis kompetensi professional/ vocational, sehingga hanya bersifat keterampilan psikomotorik, belum menumbuhkan kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi akademik, yang akan menunjang pada kegigihan, ketekunan, kejujuran, etos kerja, tanggungjawab, kerjasama, sikap terbuka, percaya diri dan sikap kemandirian. Belum adanya bahan ajar untuk mengembangkan watak dan karakter kemandirian serta sikap kewirausahaan yang disusun oleh pihak LKP. Kurikulum yang ada belum menyentuh pengembangan watak dan pendidikan karakter.

Perencanaan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi pada keterampilan, membutuhkan kehadiran Sumber Daya Manusia (SDM) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), khususnya SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengidentifikasi kebutuhan warga masyarakat sebagai masukan dalam pengambilan alternatif kebijakan tentang pelaksanaan program PKH.

Keputusan diambil pada tahap perencanaan sebagai persiapan penyelenggaraan suatu program yang didasarkan atas layak tidaknya kondisi masyarakat, namun pada kenyataannya sangat jarang dijumpai lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, terutama pada LKP yang melakukan analisis kebutuhan belajar secara sistematis. Demikian pula tentang analisis potensi kemitraan dengan unsur-unsur terkait, baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun unsur pemerintah Mengingat LKP memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas pendidikan dan keterbatasan SDM, maka dibutuhkan kemitraan atau sinergi yang dapat membantu pencapaian tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

Identifikasi potensi kemitraan dengan unsur-unsur governance (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam Muhammad Hasbi (2012: 53) bahwa:

Potensi sinergitas pelayanan pendidikan kecakapan hidup di kota Makassar cukup besar dan beragam. Potensi tersebut terutama terkait penyediaan peluang usaha dan lapangan kerja, penyertaan SDM dalam pelaksanaan program, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung PKH.

Jika sinergi atau kemitraan terjalin antara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan unsur Dunia Usaha dan Industri (DUDI) yang dikelola oleh pemerintah atau swasta sejalan dengan kebutuhan belajar masyarakat berdasarkan hasil identifikasi, maka program PKH yang dilaksanakan akan berdampak pada hasil pembelajaran yang maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan kecakapan hidup.

Hal lain yang tampak dalam penyelenggaraan PKH adalah LKP yang melaksanakan program PKH belum dapat memperlihatkan hasil maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujanto (2013:71), bahwa:

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) selama ini dirasakan kurang optimal dalam membantu mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini dikarenakan program pelatihan yang diadakan kurang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sehingga lulusan LKP belum memiliki kemampuan dan kualitas untuk terjun langsung ke dunia usaha dan dunia industri.

Mengingat kondisi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kota Makassar yang sangat bervariasi dilihat dari jenis program kursus, fasilitas lembaga, dan sumber daya manusianya, maka perlu dilakukan studi untuk mengetahui tentang penyelenggaraan program PKH, seperti perencanaan program, pelaksanaan pembelajaran, evluasi penyelenggaraan.

Untuk melihat kondisi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Salah satu Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ada di kota Makassar yang dikembangkan oleh YPA Handayani. Pilihan lembaga ini sesuai dengan hasil penelitian awal yang di lakukan diketahui bahwa yayasan ini memiliki kinerja baik yang di lakukan oleh direktorat pembinaan kursus dan pelatihan dengan berapa program yang di kembangkan yakni yayasan kursus mengemudi mobil, kursus komputer, kursus bahasa inggris, , kursus menjahit. Berdasarkan keadaan tersebut peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan pada YPA Handayani di Kota Makassar sehingga masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup pada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berkaitan dengan perencanaan program, pelaksanaan pembelajaran dan evalusai program kecakapan hidup di YPA Handayani Kota Makassar.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah penelitian ini adalah Bagaimana gambaran penyelenggaraan program kursus pendidikan kecakapan hidup pada Lembaga Kursus dan Pelatihan YPA Handayani meliputi:

1. Bagaimana gambaran perencanaan program pada Lembaga Kursus YPA Handayani Kota Makassar?
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga Kursus YPA Handayani Kota Makassar?
3. Bagaimana gambaran Evaluasi Program pada Lembaga Kursus YPA Handayani Kota Makassar?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengatahui bagaimana perancanaan program kursus pada YPA Handayani Kota Makassar.
2. Untuk mengatahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran kursus pada YPA Handayani Kota Makassar.
3. Untuk mengatahui bagaiman Evaluasi program kursus pada YPA Handayani Kota Makassar.
4. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
2. Bagi perguruan tinggi khususnya Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk mengetahui tentang penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
4. Manfaat Praktis
5. Bagi masyarakat dan pemerhati pendidikan, untuk menambah informasi tentang gambaran pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup.
6. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan tentang penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.